

ANALISIS DINAMIKA DISPARITAS PENDAPATAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024–2025

Analysis of Income Disparity Dynamics in Banyumas Regency During 2024–2025

Putri Ridhotul Ngulyah^{*1}, Dian Isnawati², Aldila Krisnaresanti³

^{1,2,3}Pendidikan Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

^{*}Penulis Korespondensi; Putri Ridhotul Ngulyah^{*}

Email: putri.ngulyah@mhs.unsoed.ac.id^{*1}, dian.isnawati@unsoed.ac.id²,
aldila.krisnaresanti@unsoed.ac.id³

Informasi Artikel:

Diterima 05, 19, 2026

Disetujui 05, 20, 2026

Diterbitkan 05, 20, 2026

Keywords:

Income Disparity, Gini Ratio, Open

Unemployment Rate,

Poverty, Human

Development Index

(HDI)

Kata kunci:

Disparitas Pendapatan,

rasio Gini, Tingkat

Pengangguran Terbuka,

Kemiskinan, Indeks

Pembangunan Manusia

Abstract. Income disparity remains a crucial challenge in the development agenda of Banyumas Regency. This study aims to analyze fluctuations in income disparity and examine their relationship with unemployment, poverty, economic growth, and the Human Development Index during the 2024–2025 period. This research employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Central Statistics Agency and various relevant scientific literature sources. The analysis was conducted through descriptive data interpretation. The results indicate a positive trend in improving income distribution, as reflected by the decline in the Gini ratio from 0.385 in 2024 to 0.358 in 2025, placing the region in the category of moderate inequality. The open unemployment rate increased; however, it did not directly affect income disparity. Meanwhile, the decline in poverty levels, improvement in economic growth, and increase in the Human Development Index contributed to better income distribution within the community. This study concludes that income disparity in Banyumas Regency is influenced by various multidimensional factors, thereby requiring inclusive and sustainable development policies to achieve a more equitable distribution of public welfare.

Abstrak. Isu disparitas pendapatan masih menjadi tantangan krusial dalam agenda pembangunan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fluktuasi disparitas pendapatan serta mengkaji keterkaitannya dengan pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia pada periode 2024-2025. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif berupa perbaikan distribusi pendapatan, ditandai oleh penurunan rasio Gini dari 0,385 pada 2024 menjadi 0,358 pada 2025, yang menempatkan wilayah ini pada kategori ketimpangan sedang. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan, namun tidak secara langsung memengaruhi disparitas pendapatan. Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berkontribusi terhadap perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Problematika disparitas pendapatan hadir sebagai kendala multidimensi dalam proses kemajuan ekonomi. Kondisi ini terwujud apabila alokasi kekayaan di tengah masyarakat tidak proporsional, yang pada gilirannya memicu stratifikasi kesejahteraan. Jika dibiarkan, hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas struktur sosial maupun efisiensi perputaran ekonomi di daerah. Lebih dari sekadar isu ekonomi, kesenjangan tersebut merupakan cerminan nyata dari belum meratanya jangkauan masyarakat terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja (Nihayah *et al.*, 2025). Dalam konteks pembangunan, tingginya tingkat disparitas berpotensi menghambat akselerasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperlebar jurang stratifikasi sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, disparitas pendapatan umumnya diukur menggunakan indikator seperti rasio Gini untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah (Palupi & Sodik, 2025).

Disparitas pendapatan juga menjadi perhatian global yang tercermin dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-10, yaitu mengurangi kesenjangan (*reduced inequalities*). Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata serta meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan karena memperbesar jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta mengurangi efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pengurangan kesenjangan menjadi agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan baik di tingkat global maupun nasional (United Nations, 2020).

Kabupaten Banyumas merepresentasikan salah satu wilayah di lingkup Provinsi Jawa Tengah yang dihadapkan pada tingkat fluktuasi ekonomi dan sosial yang cukup rumit. Salah satu kota di Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat aktivitas ekonomi adalah Purwokerto. Purwokerto berperan sebagai kota utama yang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa. Keberadaan berbagai perguruan tinggi menjadikan Purwokerto sebagai kota dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, termasuk pendatang dari luar daerah Banyumas. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan konsumsi. Namun di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan masyarakat yang masih terbatas aksesnya terhadap sumber daya ekonomi (Meilinda & Julia, 2025).

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2026a), tingkat disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas yang diukur melalui rasio Gini menunjukkan kondisi yang masih berada pada kategori sedang. Pada tahun 2024, rasio Gini Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 0,385, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,358 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2026a). Angka ini mencerminkan penurunan tingkat disparitas pendapatan, tetapi masih mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,35%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 5,97% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2026b). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara inklusif kepada seluruh strata sosial, sehingga kesenjangan tetap menjadi persoalan yang menuntut atensi khusus dalam agenda pembangunan daerah.

Berbagai studi empiris mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan sangat bergantung pada beragam determinan sosioekonomi. Di antara sejumlah variabel tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator utama yang berkontribusi secara signifikan terhadap disparitas pendapatan. Kajian dari Rohmah, Alwi, dan Vidianto (2025) mengonfirmasi bahwa IPM memiliki keterkaitan yang berbanding terbalik dan nyata dengan ketimpangan. Kondisi tersebut dimaknai bahwa optimalisasi kualitas sumber daya manusia berpotensi besar untuk mereduksi level disparitas pembagian pendapatan. Indikasi dari temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas layanan edukasi, fasilitas kesehatan, serta kemakmuran sosial merupakan prasyarat utama untuk mencapai pemerataan finansial. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran terbukti berkorelasi searah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin, sehingga secara tidak langsung mendorong pelebaran jurang ketimpangan pendapatan (Zaqiah, Triani, dan Yeni, 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa disparitas pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pengangguran terbuka, persentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan lain-lain.

Beranjak dari konteks permasalahan di atas, pokok pertanyaan yang dirumuskan dalam riset ini adalah sebagai berikut: (1) Seperti apa tren dan fluktuasi disparitas ekonomi di Kabupaten Banyumas sepanjang periode 2024–2025? Dan (2) bagaimana kontribusi variabel tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap dinamika disparitas pendapatan di daerah tersebut? Selaras dengan rumusan tersebut, kajian ini bertujuan untuk membedah situasi kesenjangan distribusi

pendapatan di Kabupaten Banyumas dan mengeksplorasi interaksi antara pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai determinan yang membentuk pola pembagian pendapatan di tengah masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori Disparitas Pendapatan

Fenomena kesenjangan ekonomi pada dasarnya lahir dari pembagian porsi pendapatan yang tidak proporsional antarwarga atau golongan di tengah masyarakat. Tingkat keparahan dari disparitas di sebuah daerah ini umumnya dievaluasi melalui pendekatan rasio Gini, yakni sebuah indikator statistik yang mengukur sejauh mana keadilan distribusi finansial telah tercapai. Menurut berbagai penelitian, disparitas atau ketimpangan terjadi akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, serta kesempatan kerja. Dalam tinjauan teori pembangunan, fenomena disparitas dapat dipahami dengan merujuk pada teori kurva Kuznets, yang memproyeksikan bahwa pada tahap permulaan akselerasi ekonomi, jurang kesenjangan berpotensi melebar sebelum akhirnya mereda sejalan dengan naiknya kemakmuran warga (Kuznets, 1955). Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh Darmuji, Alawiyah, dan Hasanah (2024) membuktikan bahwa level ketimpangan ekonomi dikendalikan oleh indikator pendidikan, tingginya warga yang belum bekerja, capaian ekonomi, dan status kemiskinan sebagai cerminan fluktuatifnya alokasi pendapatan selama fase pembangunan.

Teori Pengangguran

Secara konseptual, pengangguran merepresentasikan situasi ketika penduduk usia angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan walau sedang dalam proses pencarian kerja aktif. Pada ranah makroekonomi, rasio penduduk yang tidak bekerja merupakan tolok ukur esensial dalam menakar dinamika serapan tenaga kerja dan taraf hidup masyarakat. Dalam terminologinya, BPS (2025) mendeskripsikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai rasio komparasi antara volume orang yang menganggur dengan total penduduk angkatan kerja. Publikasi data dari BPS (2025) menunjukkan bahwa persentase TPT di Indonesia menyentuh angka 4,58%, sebuah pertanda bahwa ketersediaan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu menampung pencari kerja. Lonjakan angka individu tanpa pekerjaan ini akan berdampak pada makin tajamnya disparitas pendapatan, disebabkan oleh tidak adanya jaminan sumber finansial secara tetap. Hal ini selaras dengan penelitian Isnawati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa rasio pengangguran berbanding lurus dengan ketimpangan pendapatan karena hilangnya sumber pendapatan tetap bagi masyarakat yang tidak bekerja.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merepresentasikan ketidakberdayaan seseorang maupun suatu komunitas dalam mencukupi kebutuhan esensial kehidupan, mencakup makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Lebih dari sekadar persoalan finansial, konsep ini juga mencerminkan adanya hambatan dalam mengakses layanan edukasi, fasilitas medis, serta peluang berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Kemiskinan sering kali berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan, karena alokasi kekayaan yang asimetris berpotensi membuat segelintir warga terpinggirkan dari arus utama pembangunan. Penelitian Zaqiah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa faktor seperti pengangguran dan rendahnya taraf kompetensi individu (SDM) berkontribusi terhadap meningkatnya populasi penduduk miskin, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, kemiskinan dan disparitas atau ketimpangan memiliki hubungan yang saling memperkuat, di mana tingginya kemiskinan dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam suatu wilayah.

Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) difungsikan sebagai tolok ukur kapabilitas warga yang bertumpu pada tiga pilar esensial, yakni aspek edukasi, kapabilitas kesehatan, serta kelayakan taraf hidup. Capaian IPM memproyeksikan potret kesejahteraan masyarakat secara utuh, yang menjadikannya sebagai komponen sentral dalam kerangka kemajuan ekonomi makro. Dalam kaitannya dengan disparitas pendapatan, peningkatan IPM berpotensi menekan rasio ketimpangan seiring dengan membaiknya mutu kapabilitas masyarakat dan terbukanya saluran ekonomi yang merata. Hal ini selaras dengan hasil riset Rohmah, Alwi, dan Vidianto (2025) yang mengonfirmasi bahwa variabel IPM berkontribusi signifikan dalam menekan tingkat disparitas, dengan arti lain, optimalisasi kualitas sumber daya manusia dapat mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, pembangunan manusia diposisikan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi pada tingkat kewilayahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi secara sistematis berdasarkan data statistik tanpa melakukan pengujian hipotesis secara langsung. Metode ini digunakan untuk menganalisis dinamika disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas periode 2024–2025 melalui indikator rasio Gini serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), baik BPS Kabupaten Banyumas, BPS Provinsi Jawa Tengah, maupun BPS Indonesia. Data tersebut meliputi rasio Gini, TPT, tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan IPM Kabupaten Banyumas tahun 2024–2025. Penelitian ini juga didukung oleh studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan disparitas pendapatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data statistik dari publikasi resmi BPS, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk melihat perkembangan disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas serta membandingkannya dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, analisis tren digunakan untuk melihat perubahan rasio Gini, TPT, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM selama periode penelitian. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas pendapatan merepresentasikan situasi di mana alokasi pendapatan tidak merata antarstrata sosial yang diukur menggunakan rasio Gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025b), level disparitas di lingkup nasional masih berada pada klasifikasi menengah dengan angka 0,381, yang mengindikasikan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum terealisasi secara optimal. Di tingkat daerah, fenomena ketimpangan juga terjadi di Kabupaten Banyumas, terutama pada wilayah perkotaan seperti Purwokerto yang didominasi oleh perputaran roda ekonomi yang masif, sehingga berpotensi memicu derajat disparitas yang lebih tajam ketimbang wilayah perdesaan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (2025b), wilayah perkotaan umumnya memiliki rasio Gini lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan karena adanya perbedaan akses ekonomi. Beberapa kecamatan di wilayah pinggiran Banyumas menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah karena struktur ekonomi yang relatif homogen. Rasio Gini Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,385. Apabila dikomparasikan dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas termasuk kategori ketimpangan

sedang, di mana rasio Gini Kabupaten Banyumas tercatat lebih rendah dibandingkan Kabupaten Klaten (0,437), Kabupaten Sukoharjo (0,390), Kabupaten Wonogiri (0,392), dan Kota Magelang (0,462), meskipun masih berada di atas Kabupaten Cilacap (0,355), Kabupaten Purbalingga (0,314), Kabupaten Banjarnegara (0,357) serta Kabupaten Kebumen (0,327) (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026a).

Pada tahun 2025, kondisi disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas mencatatkan penyusutan tipis dibandingkan periode sebelumnya, yakni menurun sebesar 0,027, dengan rasio Gini sebesar 0,358. Pola ketimpangan antarwilayah masih relatif sama, di mana wilayah perkotaan seperti Purwokerto tetap mencatatkan rasio disparitas yang lebih tajam ketimbang wilayah perdesaan. Sementara itu, wilayah dengan struktur ekonomi berbasis pertanian (sektor primer) cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah (Nihayah et al., 2025). Penurunan rasio Gini tersebut menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan, meskipun belum signifikan. Disparitas pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia. Adapun salah satu determinan krusial yang mengintervensi level disparitas ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), karena pengangguran secara langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2026a), persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah ini pada 2024 menyentuh angka 6,18%, lalu mengalami eskalasi ke level 6,26% di tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal dan terdapat peningkatan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Secara teoretis, peningkatan pengangguran memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, di mana tingginya rasio penduduk tanpa pekerjaan akan memperlebar jurang distribusi kekayaan karena hilangnya kepastian arus kas bagi sebagian lapisan masyarakat. Namun demikian, dalam konteks Kabupaten Banyumas, meskipun tingkat pengangguran meningkat, rasio Gini justru mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Realitas tersebut dipengaruhi oleh besarnya serapan tenaga kerja di sektor nonformal, di mana penduduk yang secara administratif tercatat tidak bekerja sering kali tetap memperoleh penghasilan melalui kegiatan ekonomi mandiri, sehingga lonjakan angka pengangguran tersebut tidak memicu distorsi yang signifikan terhadap distribusi pendapatan secara makro. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan riset Rohmah, Alwi, dan Vidianto (2025) yang mengonfirmasi bahwa rasio pengangguran terbuka tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi antara

pengangguran dan kesenjangan pendapatan tidak selalu menunjukkan pola yang linier, sebab fluktuasi ketimpangan pendapatan juga dikendalikan oleh variabel eksternal seperti penurunan kemiskinan, peningkatan bantuan sosial, serta perbaikan distribusi pendapatan di kelompok masyarakat bawah. Oleh karena itu, kenaikan pengangguran di Kabupaten Banyumas belum tentu secara langsung meningkatkan ketimpangan pendapatan, melainkan perlu dianalisis bersama variabel ekonomi lainnya secara komprehensif.

Persentase kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 tercatat sekitar 11,95% dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 207,78 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2025, angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 11,15% dengan jumlah penduduk miskin 194,87 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2025b). Penurunan kemiskinan ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, meskipun masih tergolong cukup tinggi. Secara teoretis, kemiskinan memiliki hubungan erat dengan ketimpangan pendapatan, di mana tingginya tingkat kemiskinan dapat memperbesar ketimpangan pendapatan karena sebagian masyarakat tidak mampu mengakses sumber pendapatan secara optimal. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas sebesar 0,80% dalam satu tahun terakhir memberikan kontribusi langsung terhadap perbaikan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat miskin memperkecil jarak antara kelompok pendapatan rendah dan kelompok pendapatan tinggi, yang secara otomatis menurunkan rasio Gini. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Zaqiah, Triyani, dan Yeni (2023) yang menunjukkan bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin lewat stimulasi mutu kapabilitas individu (SDM) serta perluasan lapangan kerja yang efektif dapat mempersempit ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, penurunan kemiskinan sejalan dengan penurunan rasio Gini, yang menunjukkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi masyarakat turut berkontribusi dalam menurunkan disparitas atau ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,35%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 5,97% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026b). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor perdagangan, jasa, dan pendidikan, terutama di wilayah perkotaan seperti Purwokerto yang berfungsi sebagai pusat layanan regional. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah pada tahun 2025, laju PDRB Kabupaten Banyumas berada pada

tingkat yang cukup kompetitif, di mana PDRB Kabupaten Banyumas tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap (3,31%), Kabupaten Purbalingga (5,92%), Kabupaten Banjarnegara (5,26%), dan Kabupaten Kebumen (5,89%), meskipun masih berada di bawah Kabupaten Pati (6,12%) serta Kabupaten Demak (6,99%). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan. Penelitian oleh Dewi dan Suryadi (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, terutama jika hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks Kabupaten Banyumas, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami tren positif, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan masih memerlukan dukungan dari kebijakan dimensi lain. Oleh karena itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator krusial untuk menilai sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kapasitas dasar dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara lebih komprehensif.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 74,52, atau mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,56 poin jika dikomparasikan dengan periode sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2025a). Pada tahun 2025, IPM kembali meningkat menjadi 75,44 yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia. Peningkatan ini tidak terlepas dari perbaikan pada ketiga dimensi utamanya. Pada dimensi kesehatan, indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten, yang mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan publik. Pada dimensi pendidikan, terjadi pertumbuhan pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang mengindikasikan semakin luasnya jangkauan pendidikan formal bagi masyarakat. Sementara itu, pada dimensi kelayakan standar hidup, terjadi akselerasi alokasi pengeluaran riil per jiwa yang merefleksikan penguatan daya beli masyarakat. Secara teoretis, kenaikan IPM yang merata di ketiga dimensi ini berhubungan erat dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Peningkatan mutu kapabilitas SDM, khususnya yang diintervensi oleh sektor edukasi serta kesehatan, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses ekonomi yang lebih luas serta bermigrasi dari sektor informal ke sektor formal yang lebih produktif. Fenomena ini sesuai dengan riset Yoertiara dan Feriyanto (2022) yang membuktikan adanya dampak berkebalikan (negatif) dari IPM terhadap disparitas pendapatan. Hal tersebut berarti setiap peningkatan kualitas pembangunan manusia akan diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan melalui pemerataan kapasitas individu dalam menciptakan nilai ekonomi.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas berkontribusi dalam menurunkan disparitas pendapatan, meskipun pengaruhnya tidak secara langsung dan instan. Secara teoretis, capaian IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kesejahteraan berbasis tiga pilar penopang, meliputi kesehatan, jenjang edukasi, serta kelayakan standar hidup. Kesehatan yang optimal menjamin produktivitas masyarakat tetap terjaga, sementara edukasi membekali angkatan kerja dengan keterampilan yang relevan bagi pasar kerja modern. Di sisi lain, peningkatan pengeluaran per kapita mencerminkan penguatan daya beli riil masyarakat. Sinergi ketiga dimensi ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri (Rohmah, Alwi, & Vidiyanto, 2025).

Namun demikian, di wilayah perkotaan seperti Purwokerto yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan regional, peningkatan kualitas pembangunan manusia justru berisiko diikuti oleh peningkatan disparitas pendapatan akibat tekanan biaya hidup dari eksternalitas urbanisasi (Meilinda & Julia, 2025). Kehadiran pendatang dalam jumlah besar, seperti mahasiswa dan pekerja dari luar daerah, menciptakan peningkatan permintaan yang memicu inflasi lokal pada sektor hunian, pangan, dan jasa (Sejati, 2026). Kondisi ini sering kali tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan pendapatan riil masyarakat lokal, khususnya kelompok menengah ke bawah, sehingga menciptakan hambatan bagi mereka untuk mengakses secara penuh dimensi standar hidup layak meskipun fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia secara memadai di pusat kota. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa capaian IPM yang tinggi dapat bersifat bias bagi penduduk asli jika pertumbuhan ekonomi tidak dikelola secara inklusif dan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sebagai langkah strategis untuk memitigasi disparitas atau ketimpangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok melalui intervensi pasar, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal melalui pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar modern, serta penyediaan skema subsidi layanan dasar yang diprioritaskan bagi warga lokal kurang mampu guna menjamin distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan yang ditandai dengan penurunan rasio Gini dari 0,385 pada tahun 2024 menjadi 0,358 pada tahun 2025. Meskipun demikian, tingkat disparitas atau ketimpangan di Kabupaten Banyumas masih

berada pada kategori sedang dan menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Disparitas pendapatan di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka, persentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 6,18% menjadi 6,26%, namun peningkatan tersebut tidak secara langsung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Di sisi lain, persentase kemiskinan mengalami penurunan dari 11,95% menjadi 11,15%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas yang meningkat dari 5,35% pada tahun 2024 menjadi 5,97% pada tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan pendidikan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya inklusif karena manfaat pembangunan masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Purwokerto. Sementara itu, peningkatan IPM dari 74,52 menjadi 75,44 menunjukkan adanya perbaikan mutu kapabilitas masyarakat yang bertumpu pada ranah edukasi, layanan kesehatan publik, serta kelayakan taraf hidup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan melalui perluasan akses ekonomi masyarakat. Akan tetapi, fenomena urbanisasi dan meningkatnya biaya hidup di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia yang tinggi belum tentu sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal, pemberdayaan UMKM, peningkatan akses kerja, serta pengendalian biaya hidup agar distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Agustus-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2024*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/Tingkat-Ketimpangan-Pengeluaran-Penduduk-Indonesia-Semester-I-2024.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2025a). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2025*. Retrieved from <https://banyumaskab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5adf34c556062c3d064eab01/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2025.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2025b). *Kemiskinan Kabupaten Banyumas Maret 2025*. Retrieved from <https://banyumaskab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/26/248/Kemiskinan-Kabupaten-Banyumas-Maret-2025.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2026). *Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*. Retrieved from <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM4IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-kabupaten-banyumas-.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2026a). *Gini Ratio*. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTgiMg==/gini-rasio.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2026b). *Laju Pertumbuhan (q-to-q) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2025*. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM4MCMY/laju-pertumbuhan-q-to-q-produk-domestik-regional-bruto-pdrb-triwulanan-menurut-kabupaten-kota-provinsi-jawa-tengah.html>

Darmuji, Alawiyah, T., & Hasanah, K. (2024). Dampak Kualitas Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi: Sebuah Analisis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(8), 458–467. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i8.3183>

Dewi, K., & Suryadi, N. (2025). Keseimbangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan sebagai Strategi Maksimisasi Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 16089–16096. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28226>

Isnawati, D., Edgina, R. C., Qodriyah, L., & Kresnaresanti, A. (2025). Analisis Tingkat Kemiskinan di Yogyakarta 2023-2024. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 1405–1415. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3>

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.

Meilinda, D., & Julia, A. (2025). Faktor-Faktor yang Menentukan Ketimpangan Pendapatan di 5 Kota Besar Indonesia. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 5(2), 195–202. <https://doi.org/10.29313/bcses.v5i2.20064>

Nihayah, A. N., Rahmayani, D., Marpaung, G. N., Permanawati, R. N., & Ayuntavia. (2025). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(3), 2025. <https://doi.org/1047467/elmal.v6i3.7299>

Palupi, O. A., & Sodik, J. (2025). Analisis Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2007-2024. *Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 86–93. <https://doi.org/10.25139/dev.v9i2.10673>

Rohmah, W. R. M. S., Alwi, M. D. R., & Vidiyanto, M. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Investasi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) di 12 Provinsi Pada Tahun 2019-2023. *Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan*, 6(1), 1–15.

Sejati, P. P. (2026, April 21). Purwokerto Berubah Jadi Kota Urban, Siapa Paling Terdampak? Begini Kata Akademisi Unsoed. *TribunBanyumas.Com*. Retrieved from <https://banyumas.tribunnews.com/better-banyumas/90778/purwokerto-berubah-jadi-kota-urban-siapa-paling-terdampak-begini-kata-akademisi-unsoed>

United Nations. (2020). *The Sustainable Development Goals Report*.

Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>

Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(3), 33–42. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>